



BBPSI SDLP

LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)



Balai Besar Pengujian Standar Instrumen
Sumber Daya Lahan Pertanian
Kementerian Pertanian
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 31 Desember 2024
Kepala Balai Besar,



Asdianto, SP., MT
NIP. 197801012002121006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	15
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	40
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	52
VI. Lampiran dan Daftar.....	55



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114

TELEPON: (0251) 8323011 – 8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256

WEBSITE: www.sdlp.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL: bsip_sdlp@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Semeseter II Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp265.015.103 atau mencapai 425.73 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp62.250.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp14.030.951.358 atau mencapai 89.06 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp15.754.506.000

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp56.052.702.687 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp903.947.134; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp30.433.762.298; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp24.714.993.255.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp56.052.702.687.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp240.508.332, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp14.962.664.955 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp14.722.156.623. Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Sebesar Rp.6.601.577; Surplus Kegiatan Non Operasional Rp51.285.194 dan Defisit Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp14.664.269.852.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp55.957.124.100 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp14.664.269.852 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp125.827.000 dan Transaksi

Antar Entitas sebesar Rp14.634.021.439 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp56.052.702.687.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat,	Tahun 2024				Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Pendapatan Perpajakan	B.1.1	0	0	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1.2	62.250.000	265.015.103	202.765.103	425,73	315.191.124
Pendapatan Hibah	B.1.3	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah		62.250.000	265.015.103	202.765.103	425,73	315.191.124
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	4.019.138.000	3.938.943.167	(80.194.833)	98,00	3.550.795.816
Belanja Barang	B.2.2	11.504.853.000	9.861.558.191	(1.643.294.809)	85,72	12.458.842.739
Belanja Modal	B.2.3	230.515.000	230.450.000	(65.000)	99,97	0
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	B.2.4	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	B.2.5	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	B.2.6	0	0	0	0	0
Belanja Lain-Lain	B.2.7	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja		15.754.506.000	14.030.951.358	(1.723.554.642)	89,06	16.009.638.555

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	868.088.184	3.000
Piutang Bukan Pajak		33.380.000	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak		(166.900)	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	33.213.100	0
Persediaan		2.645.850	7.651.300
Jumlah Aset Lancar		903.947.134	7.654.300
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	13.152.236.000	13.152.236.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	22.323.508.159	24.043.612.159
Gedung dan Bangunan	C.2.3	19.912.199.153	19.912.199.153
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	958.580.000	958.580.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	434.112.500	337.857.500
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(26.346.873.514)	(27.170.082.201)
Jumlah Aset Tetap		30.433.762.298	31.234.402.611
Piutang Jangka Panjang	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan	C.3.1	0	0
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	0	0
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.3	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.3.4	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
Aset Lainnya	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	27.731.174.093	27.731.174.093
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2	(3.016.180.838)	(3.016.106.904)
Jumlah Aset Lainnya		24.714.993.255	24.715.067.189
Jumlah Aset		56.052.702.687	55.957.124.100
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	0	0
Hibah Yang Belum Disahkan	C.5.2	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5.3	0	0
Beban Yang Masih Harus di Bayar	C.5.4	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
Ekuitas	C.6		
Ekuitas	C.6.1	56.052.702.687	55.957.124.100
Jumlah Ekuitas		56.052.702.687	55.957.124.100
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		56.052.702.687	55.957.124.100

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	240.508.332	236.639.000
Jumlah Pendapatan		240.508.332	236.639.000
Beban	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	3.938.943.167	3.550.795.816
Beban Persediaan	D.2.2	353.925.750	1.585.598.525
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	4.790.194.285	4.874.327.412
Beban Pemeliharaan	D.2.4	2.493.045.539	2.400.835.960
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	2.229.398.067	3.599.210.742
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2.6	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.2.7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.8	1.156.991.247	1.584.859.851
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.9	166.900	0
Jumlah Beban		14.962.664.955	17.595.628.306
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(14.722.156.623)	(17.358.989.306)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.3		
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar	D.3.1	6.601.577	38.199.999
Beban Penjualan Aset Non Lancar	D.3.2	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.4		
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.4.1	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.4.2	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.1	51.285.194	40.352.125
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.2	0	0
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional		57.886.771	78.552.124
Surplus /Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(14.664.269.852)	(17.280.437.182)
Pos Luar Biasa	D.6		
Pendapatan Luar Biasa	D.6.1	0	0
Beban Luar Biasa	D.6.2	0	0
Jumlah Pos Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) LO		(14.664.269.852)	(17.280.437.182)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
Ekuitas Awal	E.1	55.957.124.100	58.531.102.461
Surplus/Defisit LO	E.2	(14.664.269.852)	(17.280.437.182)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E.3	0	0
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4		
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.4	125.827.000	0
Koreksi Lain-Lain	E.4.5	0	0
Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		0	0
Transaksi Antar Entitas	E.5	14.634.021.439	14.706.458.821
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		95.578.587	(2.573.978.361)
Ekuitas Akhir	E.6	56.052.702.687	55.957.124.100

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dasar Hukum Entitas
dan Rencana
Strategis

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
2. Pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
3. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
4. Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
5. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik pertanian;
6. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian

Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan

data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Pendapatan- LRA

Pendapatan LO

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
-------	---	------

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang
Panjang

Jangka

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2023 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.754.506.000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel B.1
Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	62.250.000	62.250.000
Jumlah Pendapatan	62.250.000	62.250.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.251.838.000	4.019.138.000
Belanja Barang	10.375.651.000	11.504.853.000
Belanja Modal	0	230.515.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	14.627.489.000	15.754.506.000

Realisasi Pendapatan
Rp265.015.103

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3265.015.103 atau mencapai 425.73 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp62.250.000. Pendapatan Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan, Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.2

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam Rupiah)*

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8.250.000	16.415.577	198.98
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	54.000.000	222.809.000	412.61
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17.890.194	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15.000	0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	6.910.000	0,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	975.332	0,00
Jumlah	61.250.000	265.015.103	425.73

Realisasi Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN per 31 Desember 2024 mengalami penurunan 65.81 persen dibandingkan tahun anggaran yang sebelumnya karena karena berkurangnya proses penghapusan Barang Milik Negara melalui mekanisme lelang berupa perlatan dan mesin.

Realisasi Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan mengalami kenaikan sebesar 12.52 persen. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya penjualan peta gambut dan kesesuaian lahan. Pendapatan juga berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya yang bersumber dari hasil kebun yang dikelola. Selain itu, terdapat peningkatan yang dari pendapatan lain-lain yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu. Peningkatan pengembalian belanja pegawai disebabkan karena adanya pengembalian belanja tunjangan fungsional peneliti yang beralih kejabatan fungsional lainnya.

*Tabel B.3
Perbandingan Realisasi Pendapatan*

TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	16.415.577	48.013.999	(65.81)
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	222.809.000	198.025.000	12.52
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Infomasi	0.00	28.800.000	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	17.890.194	28.305.000	(36.79)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	15.000	12.047.125	(99.88)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	6.910.000	0	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	975.332	0	0
Jumlah	265.015.103	310.033.384	(15.92)

Realisasi Belanja
Rp14.030.951.358

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian pada TA 2024 adalah sebesar Rp14.030.951.358 atau 89.06% dari anggaran belanja sebesar Rp15.754.506.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel B.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.019.138.000	3.938.943.167	98.00
Belanja Barang	11.504.853.000	9.861.558.194	85.72
Belanja Modal	230.515.000	230.450.000	99.97
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	15.754.506.000	14.046.158.831	89.06
<i>Pengembalian Belanja Pegawai</i>	0	(15.207.473)	-
Jumlah	15.754.506.000	14.030.951.358	88.96

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 12.36 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh:

1. Belanja barang mengalami penurunan sebesar 20.85 persen disebabkan karena terdapat anggaran kegiatan yang mengalami pemblokiran Automatic Adjustment program efisiensi Kementerian Keuangan.

*Tabel B.5
Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Belanja Pegawai	3.938.943.167	3.550.795.816
Belanja Barang	9.861.558.194	12.458.842.739
Belanja Modal	230.450.000	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah	14.030.951.358	16.009.638.555

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp3.938.943.167*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.938.943.167 dan Rp3.550.795.816. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat

negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 10.93 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tambahan pegawai dengan status PPPK
2. Aktifnya jabatan fungsional mantan peneliti yang masih bertahan di Kementerian Pertanian dan beralih kejabatan fungsional lainnya.

*Tabel B.6
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	3.938.943.167	3.550.795.816	10.93
Belanja Lembur	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	3.938.943.167	3.550.795.816	10.93
Pengembalian Belanja Pegawai	(15.207.473)	(1.080.690)	1307.2
Jumlah Belanja	3.923.735.694	3.549.715.126	10.54

Belanja Barang
Rp9.861.558.191

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.861.558.191 dan Rp12.458.842.739 Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 20.85 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Belanja barang mengalami penurunan sebesar 20.85 persen disebabkan karena terdapat anggaran kegiatan yang mengalami pemblokiran Automatic Adjustment program efisiensi Kementerian Keuangan.

*Tabel B.7
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	3.092.700.038	2.797.189.048	10.56
Belanja Barang Non Operasional	1.433.694.247	732.346.968	161.82
Belanja Persediaan	389.713.300	1.591.147.425	(75.51)

Belanja Jasa	263.800.000	1.344.791.396	(80.38)
Belanja Pemeliharaan	2.452.252.539	2.394.157.160	2.43
Belanja Perjalanan Dinas	2.229.398.067	3.599.210.742	(51.50)
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	9.861.558.191	12.458.842.739	(20.85)
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0
Jumlah Belanja	9.861.558.191	12.458.842.739	(20.85)

Belanja Modal Rp230.450.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp230.450.000 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikandibandingkan TA 2023 hal tersebut disebabkan karena pada TA 2024 terdapat pembelian modal berupa Laptop dan PC Unit sementara pada TA 2023 tidak terdapat pagu belanja modal.

*Tabel B.8
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.450.000	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	230.450.000	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	230.450.000	0	0,00

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal tanah pada TA 2024.

*Tabel B.9
Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp230.450.000

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp230.450.000, mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2023. hal tersebut disebabkan karena pada TA 2024 terdapat pembelian modal berupa Laptop dan PC Unit sementara pada TA 2023 tidak terdapat pagu belanja modal .

*Tabel B.10
Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.450.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	230.450.000	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	230.450.000	0	0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tabel B.11
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tabel B.12
Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial.

Tabel B.13

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Aset Lancar
Rp903.947.134

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp903.947.134 dan Rp7.654.300.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Bank BRI No. Rek. 650172372421000	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian tidak memiliki rekening untuk menampung pendapatan yang berasal dari PNBP. Setiap dana PNBP yang masuk akan langsung masuk ke kas negara melalui billing penerimaan negara. Bendara penerimaan hanya membuat kode billing setoran dan membukuan setiap transaksi penerimaan

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp868.088.184

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp868.088.184 dan Rp3.000

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Setara Kas sebesar Rp. 868.088.184 merupakan sisa dana hibah yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2025. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Tabel C.2
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	868.088.184	3.000
Jumlah	868.088.184	3.000

Saldo kas lainnya dan setara kas tersebut merupakan dana Hibah dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan *National Soil Information Systems to Support The Transformation of Agrifood Systems in AFACI Countries* sebesar Rp. 337.230.250 yang terdaftar dengan nomor register 2227WN8A. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dengan *Asian Food And Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)*. Kegiatan kedua adalah *Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chilli-Rice Cropping System In Coastal Indonesia* dengan nominal sebesar Rp. 1.634 yang merupakan kegiatan kerja sama antara Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dengan Australian Centre for International Agricultural Research (CIAR). Kegiatan hibah tersebut terdaftar dengan nomor register 2W2H8PDA. Kegiatan kedua adalah *Indonesia Testbed Project* dengan nominal sebesar Rp. 530.856.300 yang merupakan kegiatan kerja sama antara Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dengan Korean Agriculture Technology Promotion Agency (KOAT). Kegiatan hibah tersebut terdaftar dengan nomor register 2JL7VCNA.

Piutang Bukan Pajak
Rp33.380.000

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp33.380.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.3
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNBP	33.380.000	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	33.380.000	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

*Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perpendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0*

**C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.4
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	TP/TGR	0	-
	Jumlah	0	0

*Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0*

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

*Tabel C.5
Rincian Bagian Lancar TPA TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	TPA	0	0
	Jumlah	0	0

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek
Rp166.900*

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp166.900 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel C.6
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	33.380.000	0.5%	166.900
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	33.380.000	0.5%	166.900
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	33.380.000	0.5%	166.900

*Beban Dibayar di Muka
Rp0*

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel C.7
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Dibayar di Muka	0	0
Jumlah	0	0

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0*

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.8
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)*

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunna	0	0
Pendapatan Hasik Survey dan Pemetaan	0	0
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	0	0
Jumlah	0	0

*Persediaan
Rp2.645.850*

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.645.850 dan Rp7.651.300 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.9
Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	2.645.850	7.455.300
Barang untuk Pemeriharaan	0	196.000
Suku Cadang		
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Persediaan Lainnya		
Jumlah	2.645.8550	7.651.300

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp30.433.762.298

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp30.433.762.298 dan Rp31.234.402.611.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp13.152.236.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp13.152.236.000 dan Rp13.152.236.000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel C.10
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	13.152.236.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	0
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	0
Saldo Per 31 Desember 2024	13.152.236.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	13.152.236.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Tabel C.11
Rincian Tanah TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.0000 m ²	Jl Pahlawan, Dreded	7.306.338.000
2	1.600 m ²	Desa Laladon RT 01 RW 04	4.872.960.000
3	320 m ²	Desa Laladon RT 01 RW 04	972.938.000
Jumlah			13.152.236.000

Peralatan dan Mesin
Rp22.323.508.159

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp22.323.508.159 dan Rp24.043.612.159

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.12
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	24.043.612.159
Mutasi tambah:	
Pembelian	230.450.000
Penambahan Saldo Awal	108.996.000
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	0
Penghentian aset dari penggunaan	0
Transfer Keluar	2.059.550.000
Saldo Per 31 Desember 2024	22.323.508.159
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(21.217.639.361)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	2.825.972.798

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin selama periode pelaporan merupakan penambahan saldo awal senilai Rp108.996.000. Nilai penambahan tersebut berdasarkan Laporan Penilaian yang dilakukan Tim KPKNL Bogor Nomor: LAP-0005/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024B Tanggal 15 Januari 2024. Serta pembelian Laptop dan PC Unit sebesar Rp.230.450.000

Sementara untuk Mutasi kurang merupakan transfer keluar dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian ke Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: B-1776/PL.310/H.8/06/2024 Tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai sebesar Rp2.059.550.000

Rincian Transfer Keluar pertanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.13
Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin TA 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Rice Milling Unit (RMU)	2.059.550.000
Nilai Transfer Keluar	2.059.550.000

Gedung dan Bangunan
Rp19.912.199.153

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp19.912.199.153 dan Rp19.912.199.153.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.14
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	19.912.199.153
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	0
Saldo Per 31 Desember 2024	19.912.199.153
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(4.197.437.083)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	15.714.762.070

Tidak terdapat Transaksi penambahan ataupun pengurangan Gedung dan Bangunan selama periode pelaporan.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp958.580.000*

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp958.580.000 dan Rp958.580.000 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.15
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	958.580.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Mutasi Kurang:	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo Per 31 Desember 2024	958.580.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(931.797.070)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	26.782.930

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan selama periode Pelaporan.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Aset Tetap Lainnya
Rp434.112.500*

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp434.112.500 dan Rp337.857.500 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

*Tabel C.16
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	337.857.500
Mutasi tambah:	96.225.000
Penambahan Saldo Awal	96.225.000
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 31 Desember 2024	434.112.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(0)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	434.112.500

Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
Buku Lainnya	46 Unit	20.601.000
Laporan	35 Unit	37.950.000
Peta Digital	303 Unit	301.037.500
Peta (Map)	10 Unit	53.310.000
Jumlah	394 Unit	337.857.500

Konstruksi Dalam Penggerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Penggerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat transaksi Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP) selama periode pelaporan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp26.346.873.514

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp26.346.873.514 dan Rp27.170.082.201.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Tabel C.17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	22.323.508.159	21.217.639.361	1.105.868.798
2.	Gedung dan Bangunan	19.912.199.153	4.197.437.083	15.714.762.070
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	958.580.000	931.797.070	26.782.930
4.	Aset Tetap Lainnya	434.112.500	0	434.112.500
	Jumlah	43.628.399.812	26.346.873.514	17.281.526.298

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Piutang Jangka Panjang pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian selama periode pelaporan.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0*

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaianya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Tabel C.18
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	-	0	0
	Jumlah	0	0

*Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0*

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 13 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) selama periode pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Tabel C.19
Rincian Piutang TPA TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	-	0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

*Tabel C.20
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang TA 2024*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	-	0%	0
Macet	-	0%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

*Aset Lainnya
Rp27.731.174.093*

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp27.731.174.093 dan Rp27.731.174.093.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

*Aset Tak Berwujud
Rp27.731.174.093*

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp27.731.174.093 dan Rp27.731.174.093.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian berupa Hak Cipta Golongan I, *software*, Hasil Kajian/Penelitian dan Peta RBI skala Menengah yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel C.21
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	27.731.174.093
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Saldo Per 31 Desember 2024	27.731.174.093
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(3.016.180.838)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	24.714.993.255

Tidak terdapat transaksi penambahan maupun pengurangan aset tak berwujud selama periode pelaporan. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel C.22
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Hak Cipta Golongan I	5.175.000
2.	Software Komputer	3.012.687.229
3.	Hasil Kajian/Penelitian	24.710.591.864
4.	Peta RBI Skala Menengah	2.720.000
	Jumlah	27.731.174.093

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel C.23
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	0
Saldo Per 31 Desember 2024	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(0)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	0

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp3.016.180.838

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.016.180.838 dan Rp3.016.106.904. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel C.24
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Hak Cipta Golongan I	5.175.000	773.609	4.401.390
2.	Software Komputer	3.012.687.229	3.012.687.229	0
3.	Hasil Kajian/Penelitian	24.710.591.864	0	24.710.591.864
4.	Peta RBI Skala Menengah	2.720.000	2.720.000	0
Jumlah		27.731.174.093	3.016.180.838	24.714.993.255
B.	Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah		0	0	0
Total		27.731.174.093	3.016.180.838	24.714.993.255

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka Pendek Rp0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Tabel C.25
Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2024
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Nilai
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-
Jumlah		-

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel C.26
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Jumlah
1.	-	-
2.	-	-
Total		-

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagai berikut:

*Tabel C.27
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2024
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah
-	0
Jumlah	0

*Beban yang Masih Harus Dibayar
Rp0*

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp384.927.292 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.28
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	2024	2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

*Ekuitas
Rp56.052.702.687*

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing- masing sebesar Rp56.052.702.687 dan Rp55.951.191.100. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP Rp
240.508.332

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp240.508.332 dan Rp236.639.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel D.1
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	9.814.000	9.814.000	0.00
Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	222.809.000	107.288.000	107.67
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	90.737.000	0.00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Infomasi	0	28.800.000	0.00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	6.910.000		0.00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	975.332		0.00
Jumlah	240.508.332	236.639.000	2.45

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan, Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

Pendapatan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya pendapatan dari Layanan Survey dan Pemetaan.

Terdapat perbedaan pendapatan pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang berasal dari Penerimaan Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu sebesar Rp17.890.194, Belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu sebesar Rp15.000 dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 6.601.577.

Beban Pegawai
Rp
3.938.943.167

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.938.943.167 dan Rp3.550.795.816. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel D.2
Rincian Beban Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	3.938.943.167	3.550.795.816	10.93
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0,00
Beban Lembur	0	0	0,00
Jumlah Beban	3.938.943.167	3.550.795.816	10.93

Beban pegawai tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 10.93 persen dibandingkan tahun 2023 hal tersebut disebabkan oleh:

1. Banyaknya pegawai yang Jabatan Fungsionalnya telah aktif kembali setelah perpindahan dari Jabatan Fungsional Peneliti
2. Bertambahnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Beban
Persediaan
Rp353.925.750

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp353.925.750 dan Rp1.585.598.525. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.3
Rincian Beban Persediaan
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	353.925.750	1.374.870.325	(77.68)
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	
Beban Persediaan Lainnya	0	0	
Jumlah Beban	353.925.750	1.585.598.525	(77.68)

Beban persediaan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 77.68 persen dibandingkan tahun 2023, hal tersebut disebabkan menurunya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi.

Beban Persediaan pada Laporan Operasional senilai Rp353.925.750 tidak sama dengan Transaksi Pemakaian yang tercantum dalam Laporan Persediaan sebesar Rp495.715.850, hal tersebut dikarenakan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan senilai Rp141.790.100 tidak masuk dalam Laporan Operasional.

*Beban Barang
dan Jasa Rp
4.790.194.285*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.790.194.285 dan Rp4.874.327.412. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya kegiatan kerja sama luar negeri berupa hibah yang dikelola dan bermitra dengan instansi dari Australia dan Korea.

Secara keseluruhan beban barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 1.75 persen jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

*Tabel D.4
Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	2.418.373.488	2.579.827.176	(6.26)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	15.492.900	7.141.300	116.95

Beban Honor Operasional Satker	75.912.000	120.048.000	(36.77)
Beban Barang Operasional Lainnya	371.932.950	69.622.500	434.21
Beban Bahan	194.772.700	376.356.198	(48.25)
Beban Langganan Listrik	897.794.470	876.715.073	2.40
Beban Langganan Telepon	1.217.027	3.118.258	(60.97)
Beban Langganan Air	38.110.800	32.578.065	16.98
Beban Sewa	43.350.000	133.180.000	(67.45)
Beban Jasa Profesi	263.800.000	299.200.000	(11.83)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	453.221.950	306.350.770	205.84
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	0	20.550.072	0.00
Beban Honor Output Kegiatan	16.216.000	49.640.000	(67.33)
Jumlah Beban	4.790.194.285	4.874.327.412	(1.75)

Beban Pemeliharaan Rp2.493.045.539

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.493.045.539 dan Rp2.400.835.960. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3.84 persen dibandingkan tahun 2023. Kenaikan beban pemeliharaan tersebut karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk perawatan atas gedung dan bangunan dan juga kendaraan dinas. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.5
Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.491.293.577	1.642.681.664	(9.22)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	859.961.862	751.475.496	14.44

Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	141.790.100	4.394.000	3126.9
Beban Persediaan Suku Cadang	0	2.284.800	0,00
Jumlah Beban	2.493.045.539	2.400.835.960	3.84

Beban Perjalanan Dinas Rp 2.229.398.067

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.229.397.067 dan Rp3.599.210.742. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beban perjalanan dinas mengalami penurunan sebesar 64.44. Penurunan beban perjalanan dinas tersebut disebabkan oleh aturan Kementerian Keuangan terkait dengan efisiensi biaya perjalanan dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.6
Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.870.134.567	3.172.541.714	(54.44)
Beban Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri	58.910.000	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57.900.000	18.950.000	205.54
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	242.453.500	407.719.028	(40.53)
Jumlah Beban	2.229.398.067	3.599.210.742	(61.44)

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.7
Rincian Beban Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat TA
2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

*Beban
Bantuan Sosial
Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.8
Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp
1.156.991.247*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.156.991.247 dan Rp91.584.589.851.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan

Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	479.192.738	906.825.342	(47.16)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	553.484.966	553.484.966	0.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	124.239.609	124.239.609	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Penyusutan	1.156.917.313	1.584.649.917	(26.99)
Beban Amortisasi Hak Cipta	73.934	73.934	0.00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	136.000	0.00
Jumlah Amortisasi	73.934	209.934	0.00
Jumlah Beban	1.156.991.247	1.584.859.851	(26.99)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.10
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0,00

Jumlah Beban	0	0	0,00
---------------------	----------	----------	-------------

*Kegiatan Non Operasional
Rp57.886.771*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Peningkatan dari surplus Kegiatan Non Operasional pada tahun 2024 disebabkan karena adanya penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas melalui mekanisme lelang, serta adanya pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.11
Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Penjualan Alat Kantor	6.601.577	38.199.999	(82.72)
Selisih Kurs	0	0	0,00
Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	51.270.194	28.305.000	81.13
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	15.000	12.047.125	(99.88)
Jumlah Beban	57.886.771	78.552.124	(26.31)

*Pos Luar Biasa
Nihil*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp
55.957.124.100

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp55.957.124.100 dan Rp58.531.102.462.

Defisit LO
Rp14.664.269.852

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp17.280.437.182 dan Rp17.280.437.182. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel E.1
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024
(dalam Rupiah)

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih

Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Revaluasi aset pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian terakhir dilakukan pada tahun 2019.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp125.827.000

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp125.827.000 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah koreksi nilai yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

*Tabel E.2
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024
(dalam Rupiah)*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	125.827.000
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	125.827.000

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Tabel E.3
Rincian Koreksi Lain-lain TA 2024
(dalam Rupiah)*

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar Entitas
Rp14.634.021.439

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.634.021.439 dan Rp14.706.458.821.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar

K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Tabel E.4
Transaksi Antar Entitas TA 2024*

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(265.015.103)
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.958.342.908
Transfer Masuk	(0)
Transfer Keluar	(0)
Pengesahan Hibah Langsung	1.940.696.634
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(3.000)
Jumlah	14.634.021.439

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Diterima dari Entitas Lain Rp265.015.103 dan Ditagihkan ke Entitas Lain Rp12.958.342.908

Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp0

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp265.015.103 sedangkan DKEL sebesar Rp12.958.342.908.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari:

*Tabel E.5
Transfer Keluar TA 2024*

(dalam Rupiah)

No.	Jenis	Entitas Penerima	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1.	RMU	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	2.059.550.000	0
Jumlah			2.059.550.000	0

Sedangkan Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0. Tidak terdapat transaksi Transfer Masuk selama periode pelaporan.

Pengesahan Hibah Langsung 1.940.696.634 dan

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengembalian
Hibah Langsung
Rp3.000

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp289.350.250 dari total Rp289.350.250 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel E.6
Pengesahan Hibah Langsung TA 2024
(dalam Rupiah)*

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	ACIAR	Uang Tunai	375.735.834
2.	AFACI	Uang Tunai	956.100.000
3.	KoAT	Uang Tunai	608.860.800
Total Pengesahan			1.940.696.634
Pengesahan Pengembalian Hibah			3.000
Jumlah			1.940.696.634

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir Rp
56.052.702.687

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp56.052.702.687 dan Rp55.951.191.100

Kejadian Setelah
Tanggal Neraca

Informasi
Rekening Satuan
Kerja

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca yang perlu diungkapkan dalam laporan Keuangan ini.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

1. Informasi Rekening Satuan Kerja

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, maka Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian telah melaporkan laporan bulanan terkait dengan rekening yang dikelolanya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah.

Selama tahun 2024, satuan kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian mengelola 4 rekening yang terdiri dari 1 rekening Bendahara Pengeluaran (Virtual Account) dan 3 rekening penampungan lainnya untuk menampung dana hibah dan kerjasama (Kemitraan). Rincian rekening pemerintah yang dikelola satuan kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel F.1
Rincian Rekening Satuan Kerja

No. Rekening	Nama Rekening	Surat Ijin	
		Nomor	Tanggal
65017237242 1000	BPG 023 BALAI BPSI SDLP	S-750/KPN.1205/2023	10-04-2023
00120100479 0303	RPL 140 PDHL BBSQLP UNTUK – 22227WN8A	000411	06-11-2023
00120100401 6301	RPL 140 PDHL BBSQLP UNTUK 2W2H8PD	000095	25-01-2021
00120100488 7304	RPL 140 PDHL UNTUK 2JL7VCNA	000316	14-10-2024

2. Hibah

a. Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)

Pada tahun 2023, terdapat hibah pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian yaitu kegiatan *National Soil Information Systems to Support The Transformation of Agrifood Systems in AFACI Countries*. Adapun pendonor hibah tersebut adalah Asian Food and

Asian Food and
Agriculture
Cooperation
Initiative

Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) International Technologi Cooperation Center RDA, 300 Nongsaengmyeong-ro, Doekjin-gu Jeonju-si, 54875 Republic of Korea dengan nomor perjanjian hibah LOA.18.09.2023. Nomor register kegiatan hibah tersebut adalah 2227WN8A dan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan surat nomor S-687/PR.8/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Jangka waktu pelaksanaan hibah AFACI ini adalah selama 3 (tiga) tahun, dimulai pada tanggal 18 September 2023 – 18 September 2026 dengan nilai total hibah sebesar USD 90.000. Pada tahun 2024 telah dilakukan pengesahan dana hibah berupa pendapatan sebesar Rp956.100.000 dan belanja terkait hibah sebesar Rp618.869.750. Sisa dana hibah sebesar Rp337.230.250 akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan ditahun 2025.

Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chilli-Rice Cropping System in Coastal Indonesia

b. Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chilli-Rice Cropping System in Coastal Indonesia

Pada tahun 2020 terdapat hibah pada Balai Besar Pengujian Standar Sumber Daya Lahan Pertanian yaitu Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chilli-Rice Cropping System in Coastal Indonesia. Nomor register kegiatan hibah adalah 2W2H8PDA dan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan surat nomor: S-5/PR.8/2021 Tanggal 6 Januari 2021. Perjanjian kerjasama hibah dengan ACIAR tersebut tertuang dalam MoU Nomor: SLAM/2018/145/237242. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah dilakukan pengesahan dana hibah berupa pendapatan sebesar Rp1.929.136.018 dan belanja terkait hibah sebesar Rp1.929.134.384. Sisa dana hibah sebesar Rp1.634 akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan ditahun 2025.

Indonesia Testbed Project

c. Indonesia Testbed Project

Pada bulan Agustus 2024, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian menjalin Kerjasama dengan *Korean Agriculture Technology Promotion Agency* (KOAT) untuk melakukan pengujian produk produk pupuk Indonesia.

Nomor register kegiatan hibah adalah 2JL7VCNA dan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan surat nomor: S-643/PR.8/2024 Tanggal 4 Oktober 2024. Perjanjian kerjasama hibah dengan KoAT tersebut tertuang dalam MoU Nomor: KoAT.20.10.2024 Tanggal 20 Agustus 2024. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah dilakukan pengesahan dana hibah berupa pendapatan sebesar Rp608.860.800 dan belanja terkait hibah sebesar Rp78.004.500. Sisa dana hibah sebesar Rp530.856.300 akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan ditahun 2025.

4. Pengembalian Tunjangan Fungsional Pegawai

Piutang Kelebihan
Pembayaran
Tunjangan
Fungsional
Peneliti

Terdapat 2 pegawai Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian yang memiliki piutang Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Peneliti periode September 2022 sampai dengan Desember 2023 dengan nilai total sebesar Rp42.930.000. Nilai Tersebut merupakan nilai total Tunjangan Fungsional Peneliti dikurangkan dengan nilai setoran pengembalian sampai dengan 30 September 2024 dan Tunjangan Fungsional Umum.

Rincian Nilai Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel F.2

Piutang Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Peneliti
(dalam Rupiah)

No	Nama Pegawai	Kelebihan JF Peneliti	Kekurangan Tunjangan Umum	Nilai Setoran sd 31 Desember 2024	Koreksi	Total Piutang
1	Anggri Hervani	31.500.000	3.330.000	1.050.000	6.260.000	33.380.000
2	Setyo Purwanto	19.800.000	3.330.000	16.470.000		0
TOTAL						33.380.000

Koreksi tambah sebesar Rp6.260.000 dilakukan terhadap piutang atas nama Anggri Hervani karena yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran pengembalian belanja atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Peneliti periode bulan Januari sampai Maret 2024.

5. Pengembalian Belanja atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Peneliti

Pengembalian
Belanja atas
Kelebihan
Pembayaran
Tunjangan
Fungsional
Peneliti

Terdapat 4 pegawai Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian yang harus membayar Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Peneliti periode bulan Januari sampai Maret 2024 dengan nilai total sebesar Rp11.220.000. Nilai Tersebut merupakan nilai total Tunjangan Fungsional Peneliti dikurangkan dengan nilai setoran pengembalian sampai dengan 30 September 2024 dan Tunjangan Fungsional Umum.

Rincian Nilai Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel F.2

Pengembalian Belanja atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Peneliti

(dalam Rupiah)

No	Nama Pegawai	Kelebihan JF Peneliti	Kekurangan Tj Umum	Nilai Setoran sd 31 Desember 2024	Koreksi	Total Pengembalian
1	Anggri Hervani	7.000.000	740.000	0	(6.260.000)	0
2	Setyo Purwanto	4.400.000	740.000	3.660.000	0	0
3	Ibrahim Adamy Sipahutar	3.500.000	370.000	3.130.000	0	0
4	Ratri Ariani	2.200.000	370.000	1.830.000	0	0
						0

Koreksi kurang sebesar Rp6.260.000 dilakukan terhadap piutang atas nama Anggri Hervani karena yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran pengembalian belanja atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Peneliti periode bulan Januari sampai Maret 2024, sehingga dilakukan jurnal balik atas piutang tersebut pada modul pelaporan dan dilakukan perekaman berupa koreksi tambah pada modul piutang.

5. Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan

Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Nomor: B-2063/OT.050/H.8/07/2024 Tanggal 19 Juli 2024 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Nomor B-05/OT.050/H.8/01/2024 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2024

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Dr. Ir. Rahmawati, MM
Pejabat Pembuat Komitmen	: Aris Dwi Saputra, SE
Pejabat Penandatangan SPM	: Anik Hastuti,SP.,MM
Bendahara Pengeluaran	: Haryani, SE
Operator Pelaporan	: Teguh Mulyono, SM
Bendahara Penerimaan	: Tedy Januar, SE
Operator Pelaporan	: Wiwit Winarto, A.Md
Operator BMN	: Tulus Arizon, A.Md
Operator Persediaan	: Nurmani, A.Md
Operator Piutang	: Wiwit Winarto, A.Md

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Asdianto, SP., MT
Pejabat Pembuat Komitmen	: Aris Dwi Saputra, SE
Pejabat Penandatangan SPM	: Anik Hastuti,SP.,MM
Bendahara Pengeluaran	: Haryani, SE
Operator Pelaporan	: Teguh Mulyono, SM
Bendahara Penerimaan	: Tedy Januar, SE

Operator Pelaporan	: Wiwit Winarto, A.Md
Operator BMN	: Tulus Arizon, A.Md
Operator Persediaan	: Nurmani, A.Md
Operator Piutang	: Wiwit Winarto, A.Md